



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar secara minimal bagi masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai standar pelayanan minimal yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah disusun dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

BAB II
UMUM

Pasal 2

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB III
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 5

- (1) Bagian pemerintahan selaku sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

- a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari PD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB IV
INTEGRASI SPM

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda Litbang selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda Litbang selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB V
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;

BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;

BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;

BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. Program, Kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Indikator Kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.
- (8) Strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh PD yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan ke empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DAERAH DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2024- 2028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Bupati Kabupaten Kutai Timur, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
1.3 KONDISI UMUM WILAYAH	3
1.3.1 LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	3
1.3.2 TOPOGRAFI	5
1.3.3 HIDROLOGI	6
1.3.4 DEMOGRAFI	6
1.3.5 KAWASAN RAWAN BENCANA	7
1.3.6 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	9
1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM	11
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	13
2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	13
2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	18
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	21
3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI	21
3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	31
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM ...	42
4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	42
4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 KESIMPULAN	49
5.2 SARAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur	3
Tabel 2.2.1	Kondisi capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	10
Tabel 2.2.2	Kondisi capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	11
Tabel 2.2.3	Kondisi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	12
Tabel 2.2.4	Kondisi capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	12
Tabel 2.2.5	Kondisi capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	13
Tabel 2.2.6	Kondisi capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	14
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2028	31
Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2028	32
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2028	35
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2028	35
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2028	36
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2028	37
Tabel 4.1	Evaluasi Pencapaian Indikator SPM	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan sebagai alat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

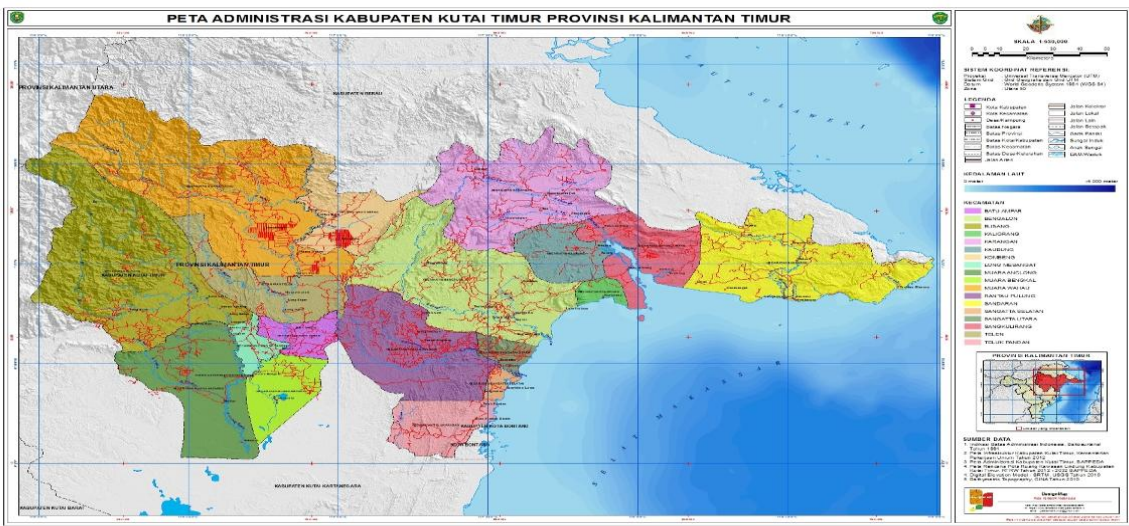
Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Kutai Timur secara geografis memiliki luas wilayah antara 115°56'26"-118°58'19" Bujur Timur (BT) dan 1°17'1” Lintang Selatan (LS) - 1°52'39" Lintang Utara (LU). Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

- 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Berau;
- 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang;
- 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
- 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5	6
1	64.08.17	Batu Ampar	204,50	7	-
2	64.08.09	Bengalon	3.196,24	11	-
3	64.08.06	Busang	3.721,61	6	-
4	64.08.10	Kaliorang	438,91	7	-
5	64.08.16	Karangan	3.064,36	7	-
6	64.08.15	Kaubun	257,45	8	-
7	64.08.08	Kongbeng	581,27	7	-
8	64.08.18	Long Mesangat	526,98	7	-
9	64.08.01	Muara Ancalong	2.739,30	9	-
10	64.08.02	Muara Wahau	5.724,32	10	-
11	64.08.03	Muara Bengkal	1.522,80	7	-
12	64.08.14	Rantau Pulung	143,82	9	-
13	64.08.11	Sandaran	3.419,30	9	-
14	64.08.12	Sangatta Selatan	1.660,85	3	1
15	64.08.04	Sangatta Utara	1.262,59	3	1
16	64.08.05	Sangkulirang	3.322,80	15	-
17	64.08.07	Telen	3.129,61	8	-
18	64.08.13	Teluk Pandan	831.00	6	-
	Jumlah		35.747,50	139	2

Sumber : Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2022

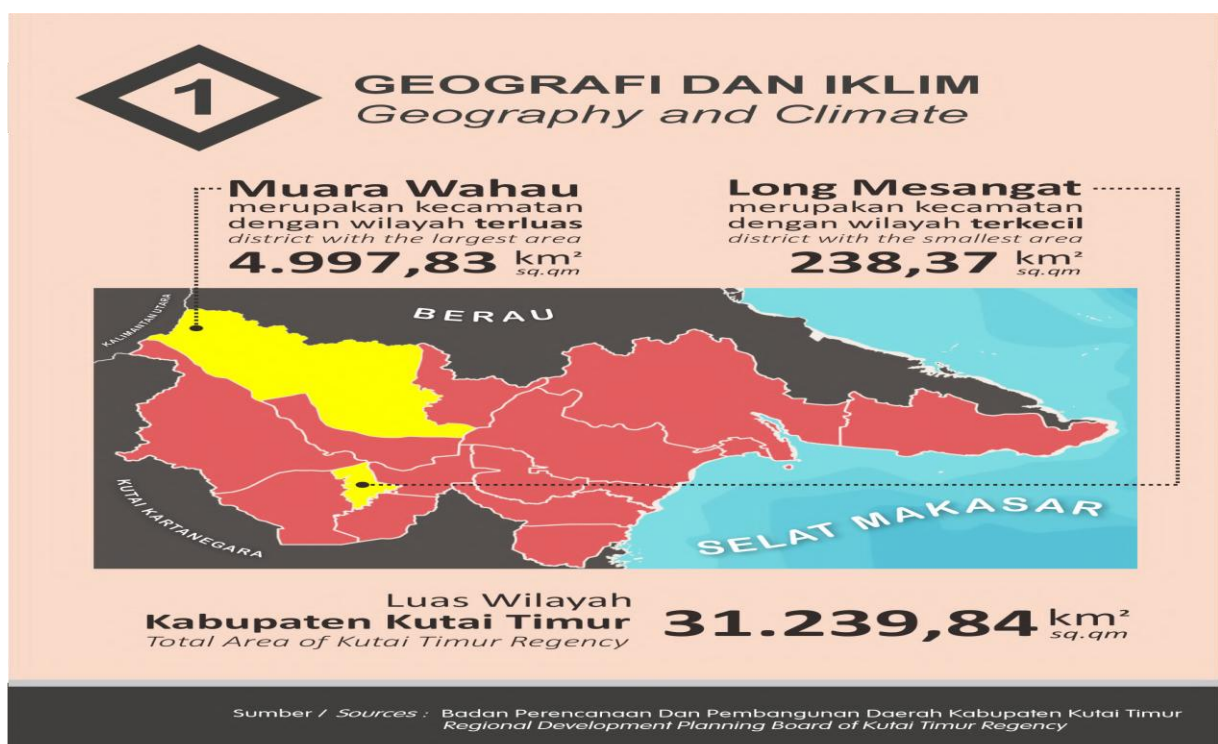
Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur tercatat 35.747,50 km², dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Muara Wahau yaitu 5.724,32 km², dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rantau Pulung 143,82 km².

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, berupa daerah dataran dengan luas mencapai 536.200 ha, lereng bergelombang 1,42 Juta ha dan daerah pegunungan 1,6 juta ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

1.3.2. Topografi

Topografi daerah Kabupaten Kutai Timur bervariasi dalam wilayah: dataran, berbukit, pegunungan, dan wilayah pantai. Wilayah daratan bervariasi anantara ketinggian tanah dari 07 meter sampai lebih dari 1.000 Meter dari permukaan laut. Kawasan relatif datar dan landai hanya terdapat Kecamatan Sangatta Utara, Muara Bengkal, Muara Ancalong serta sebagian dari Muara Wahau dan Sangkulirang. Daerah yang bebatasan dengan Kabupaten Berau, yaitu Kecamatan Sangkulirang, Muara

Wahau dan Muara Ancalong, Ketiga Kecamatan ini merupakan daerah pegunungan kapur, dengan kawasan pegunungan 1.608.915 Ha dan Perbukitan 1.429.922,5 Ha. Wilayah dataran di tiga Kecamatan ini seluas 536.212,5 Ha, yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan berupa sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat diseluruh kecamatan sedangkan danau hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu Danau Ngayau dan Danau Karang. Wilayah pantai yang berada disebelah Timur wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai ketinggian anantara 0-7 Meter diatas permukaan laut, Wilayah ini mempunyai sifat kelerengan di atas 15 persen. Wilayah dengan kelerengan diatas 40 persen mempunyai ketinggian diatas 500 Meter diatas permukaan laut. Wilayah dengan ketinggian 500 Meter diatas permukaan laut mempunyai sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40 persen dan sangat berpotensi erosi, Kabupaten Kutai Timur mempunyai iklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26°C. Range atau perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°-7°C. Curah hujan terdokumentasi anantara 2.000-4.000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130-150 hari/tahun. Potensi hidrologi di Kabupaten Kutai Timur cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai anantara lain: Sungai Sangatta, Sungai Marah dan Sungai Wahau, Peranan sungai di daerah ini sangat penting yaitu sebagai sarana transportasi air antara daerah pantai dan daerah pedalaman, Sebagian sungai juga dimanfaatkan sebagai sumber air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya.



Gambar : Peta Topografi dan Kelerengn Kabupaten Kutai Timur.

Keadaan Geografi Luas daerah dan jumlah Pulau menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023;

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km
(1)	(2)	(3)
Muara Ancalong	Kelinjau Ilir	2.289,84
Busang	Long Lees	3.561,07
Long Mesangat	Sumber Sari	238,37
Muara Wahau	Muara Wahau	4.997,83
Telen	Juk Ayak	1.783,08
Kongbeng	Miau Baru	1.101,24
Muara Bengkal	Muara Bengkal Ulu	758,80
Batu Ampar	Batu Timbau	759,01
Sangatta Utara	Sangatta Utara	333,56
Bengalon	Sepaso	3.429,36
Teluk Pandan	Teluk Pandan	926,04
Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	1.201,06
Rantau Pulung	Kebon Agung	916,04
Sangkulirang	Benua Baru Ilir	1.630,38
Kaliorang	Bangun Jaya	302,93
Sandaran	Manubar	2.829,54
Kaubun	Bumi Etam	578,44
Karangan	Karangan Hilir	3.603,23
Kutai Timur	Sangatta Utara	31.239,84

Sumber/Source: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur/Regional Development Planning Board of Kutai Timur Regency

Kecamatan Subdistrict	Persentase terhadap Luas Kabupaten Percentage to Regency's Area	Jumlah Pulau Number of Islands
(1)	(4)	(5)
Muara Ancalong	7,33	-
Busang	11,40	-
Long Mesangat	0,76	-
Muara Wahau	16,00	-
Telen	5,71	-
Kongbeng	3,53	-
Muara Bengkal	2,43	-
Batu Ampar	2,43	-
Sangatta Utara	1,07	-
Bengalon	10,98	-
Teluk Pandan	2,96	1
Sangatta Selatan	3,84	2
Rantau Pulung	2,93	-
Sangkulirang	5,22	8
Kaliorang	0,97	-
Sandaran	9,06	8
Kaubun	1,85	-
Karangan	11,53	-
Kutai Timur	100,00	19

Sumber/Source: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur/Regional Development Planning Board of Kutai Timur Regency

1.3.3. Hidrologi

Topografi daerah Kabupaten Kutai Timur bervariasi dalam wilayah: dataran, berbukit, pegunungan, dan wilayah pantai. Wilayah daratan bervariasi antara ketinggian tanah dari 07 meter sampai lebih dari 1.000 Meter dari permukaan laut. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai dan pantai.Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki kelerengan diatas 40 persen mempunyai ketinggian diatas 500 Meter diatas permukaan laut. Terdapat dibagian wilayah laut punya sifat berbukit sampai bergunung dengan kelerengan lebih dari 40 persen dan sangat berpotensi erosi.

1.3.4. Demografi

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Timur pada tahun 2020 sebesar 424.743 jiwa dan terus meningkat menjad 425.787 jiwa pada tahun 2023.

Tinggi Wilayah dan jarak ke ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023.

Kecamatan Subdistrict		Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)Distance to the Capital of Regency (km)
	(1)	(2)	(3)
Muara Ancalong		15,00	369,00
Busang		36,00	267,00
Long Mesangat		21,00	196,00
Muara Wahau		36,00	119,00
Telen		33,00	150,00
Kongbeng		44,00	217,00
Muara Bengkal		17,00	369,00
Batu Ampar		60,00	175,00
Sangatta Utara		23,90	7,50
Bengalon		28,00	60,00
Teluk Pandan		14,00	88,00
Sangatta Selatan		4,87	62,00
Rantau Pulung		53,00	87,00
Sangkulirang		4,00	151,00
Kaliorang		19,00	96,00
Sandaran		21,00	201,00
Kaubun		13,00	125,00
Karangan		34,00	170,00

Sumber/Source: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur/Regional Development Planning Board of Kutai Timur Regency

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat ini tengah menyusun Dokumen KRB untuk periode 2024-2028. Langkah ini diperlukan mengingat berdasarkan indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan BNPB, Kutim memiliki nilai indeks tinggi yaitu 181,57, Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Potensi bencana di Kabupaten Kutai Timur yang sangat rawan terjadi yaitu banjir, epindemi, gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Aktivitas manusia yang berpotensi meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Pada tahun 2021, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kutai Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 190,00 dan di tahun 2022 IRBI Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 181,57, atau penurunan sebesar 8,43 poin dari tahun 2021, meskipun demikian Kabupaten Kutai Timur masih berada

dalam zona yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kabupaten Kutai Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 22,91 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Batubara dan Migas hingga menjadi 35,35 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor migas dan batubara mengalami peningkatan mencapai 6,18 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 85,09 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59

persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi Tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi lingkungan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh Tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Kutai Timur terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

**Tabel 2.1 Jumlah Total Yang Harus Dilayani Kondisi capaian SPM Bidang Pendidikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023**

Kabupaten	Pendidikan Dasar Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kutai Timur	16,221	14,952	92,18%	80,155	75,215	93,84	3.085	3.085	100%	873,579.530.752	732.891.426.951

Sumber: Laporan e-SPM Kabupaten Kutai Timur

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Kabupaten Kutai Timur	Pelayanan Bidang Kesehatan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Capaian (%)		
Pelayanan Kesehatan ibu hamil	8.235	7.606	92.36%	1,272,124,950	1,148,419,072
Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	7.861	7.307	92,95%	2,008,808,800	1,894,491,617
Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	7.434	6.680	89,86%	800,000,000	768,082,253
Pelayanan Kesehatan Balita	35.074	29.088	82,93%	2,766,790,250	2,589,495,635
Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	68.021	62.345	91,66%	2,540,581,250	2,333,656,980
Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	317.647	258.210	81,29%	882,920,750	765,964,889
Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	19.272	16.514	85,69%	2,100,000,000	1,989,836,018
Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	119.824	107783	89,95%	330,000,000	308,548,271
Pelayanan Kesehatan penderita diabetes militus	10.183	9.621	94,48%	1,165,165,000	1,085,077,608
Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)berat	531	398	74,95%	454,724,000	434,466,390
Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkolosis	7.020	6.473	92,21%	3,380,434,441	2,472,018,284
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	16.360	15.333	93,72%	3,870,000,000	3,747,234,271

Sumber : Laporan e-SPM Kabupaten Kutai Timur

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Kabupaten	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari kabupaten/kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kutai Timur	429,640	249.635	58,10%	-	-	-	106,354,285,728	101,199,434,978

Sumber : Laporan e-SPM Kabupaten Kutai Timur

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Kabupaten	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kutai Timur	455	-	-	-	-	-	3,400,000,000	-

Sumber : Laporan e-SPM Kabupaten Kutai Timur

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Kabupaten Kutai Timur	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah Kabupaten Kutai Timur			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Trantibum	19	19	100 %	10,721,228,231	10,183,623,830
Informasi rawan bencanaan	425.787	425.787	100 %	16.512,210,900	13,477,593,437
Pecegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	429.640	429.640	100 %	27,945,929,083	27,602,088,385

Sumber : Laporan e-SPM Kabupaten Kutai Timur

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6

Tabel 2.7 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023

Kabupaten Kutai Timur	Pelayanan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kutai Timur			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di dalam Panti	343	50	14,58%	2.815.832,400	114,175,705
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di dalam Panti	144	144	100%	2.574.750.000	2.574.750.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di dalam Panti	45	15	33.33%	2.574.750.000	2.574.750.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di dalam Panti	55	55	100%	2.574.750.000	2.574.750.000

Sumber: Laporan e-SPM Kabupaten Kutai Timur.

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Kutai Timur ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur melayani pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan yang tersebar di 18 Kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur, sehingga untuk penerapan SPM masih terkendala dengan letak geografis seperti akses yang sulit dijangkau ke daerah ataupun sekolah-sekolah kategori 3T (Terpencil, Tertinggal, dan Terluar);
2. Masih terdapat permasalahan dalam pengumpulan data, untuk SPM ini juga data sudah disediakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetapi untuk rincian data perkecamatan susah di dapatkan;
3. Per Desember belum ada update data penduduk semester 2 dari BPS untuk 5-6 tahun, 7-12 tahun dan 7-18 tahun;
4. Untuk kolom pendukung terkait sub kegiatan, yang tertera di dalam aplikasi bukan sub kegiatan melainkan rincian kegiatan sehingga jika dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) anggaran yang dimasukkan seharusnya sub kegiatan seperti yang tertera pada aplikasi;
5. Untuk data penduduk yang digunakan dalam pengisian SPM Kabupaten yaitu data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sedangkan data yang di hasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan data Penduduk dari BPS, sehingga ada selisih data capaian antara Pusat dan Kabupaten;

2.2.2.Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan SDM Puskesmas Yang Masih Minim terkait pelayanan anak usia serkolah dan remaja di beberapa puskesmas.
2. Pasilitas Sarana dan Prasarana belum maksimal dalam pemenuhan kualitas pelayanan anak usia sekolah dan remaja.
3. Dukungan dan Koordinasi LPLS dan jejaring yang belum optimal.

2.2.3.Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kutai Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Kondisi geografis dan sebaran penduduk yang berjauhan, serta Sebagian berada di perdesaan menyebabkan system penyediaan air minum, khususnya dengan jaringan perpipaan relative sulit untuk dilakukan dalam system jaringan terpusat.
2. Data capaian air bersih (Akses Layak) belum terakomodir sepenuhnya, saat ini data yang dimasukan dalam capaian adalah akses air bersih jaringan perpipaan dan belum mendapatkan data terkait jaringan non perpipaan.
3. IPLT yang ada belum beroperasi sehingga untuk capaian air limbah domestik belum bisa masuk kategori akses limbah aman, Tahun 2023 dilakukan perbaikan dan penyempurnaan IPLT dan diharapkan kedepannya dapat dioperasikan.

2.2.4.Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kutai Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Pendataan dan identifikasi yang masih berjalan sehingga belum didapatkan data yang mendetail terkait penerima bantuan korban bencana/relokasi program pemerintah daerah di Kabupaten Kutai Timur;
2. Perlunya percepatan dalam hal penerbitan SK Pelaksanaan bantuan rehabilitasi korban bencana;
3. Indikator kedua dari pemenuhan SPM yaitu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur masih dalam tahap perencanaan sehingga data yang terisi merupakan perkiraan perencanaan untuk bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Kutai Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Data kawasan rawan bencana yang perlu diupdate.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda /Perkada.
4. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara bidang dan instansi terkait.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Kutai Timur berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kutai Timur Belum terdapatnya Sarana dan Prasarana untuk klien terlantar.
2. Kabupaten Kutai Timur Belum terdapat tenaga medis untuk klien di rumah singgah.

3. Kurangnya aparatur pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.
4. Penelusuran ke keluarga dan masyarakat agak susah, karena sub kehilangan kontak antara klien dan keluarganya.
5. Adanya penolakan dari keluarga klien terkait penanganan atau reunifikasi disabilitas khusus ODGJ.
6. Adanya penolakan keluarga dari klien lansia terlantar untuk dilakukan rehabilitasi.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1. SPM Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Kutai Timur Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Menengah	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		(SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)		(delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas	1	Peningkatan kualifikasi dan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)		kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan
			2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi
		Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan
2	Program SPM Pendidikan Khusus	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2. SPM Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang

3.1.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Liter/Detik
			3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	SR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Dokumen
			6	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	SR
			7	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota
			8	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota
			9	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Unit
			10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
			11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha
			12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Dokumen
			3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Rumah Tangga
			5	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen
			6	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat
			7	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
			9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit

3.1.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana	Dokumen
			4	Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten	Unit Rumah

3.1.5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Bupati	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan
			2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan
			3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
			2	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Dokumen

3.1.6. SPM Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
			4	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
			7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Orang
			9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1	Pengasuhan	Orang
			2	Penyediaan Makanan	Orang
			3	Penyediaan Sandang	Orang
			4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
			5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
			7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Orang
			13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
			4	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
			7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			8	Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	Orang
			9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12	Pemulasaraan	Orang
			13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang
			8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang
			9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang
			11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Dokumen
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Kutai Timur 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1)	Pendidikan Dasar Usia Dini (PAUD)	%	2023	16449	16449			282,547,441,109			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Angka partisipasi sekolah	%				100	98.27				
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				98.27	98.27				
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%				64.83	34.92				
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				58.74	55.41				
5	Kecukupan formasi guru ASN	%				0.15	0.15				
6	Indeks distribusi guru	%				50	0				
7	Proporsi PTK bersertifikat	%				0.35	0.35				
8	Proporsi PTK penggerak	%				15.48	15.48				
9	Pengalaman pelatihan guru	%				0.07	0.07				
2)	Pendidikan Dasar SD		2023	79614	79614			1,252,512,421,923			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Angka partisipasi kasar	%				105,1	105,1				
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	99.72				
3	Angka partisipasi murni	%				56.75	65.88				
4	Kemampuan literasi	Nilai				40.46	53.71				
5	Kemampuan numerasi	Nilai				6.2	0				
6	Perbedaan skor literasi	Nilai				3.66	0				
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai				73.91	69.49				
8	Indeks iklim keamanan	Nilai				73.91	72.38				

9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%				60.88	52.42				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				46,8	46,8				
11	Indeks distribusi guru	%				0,4	0,4				
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				28,17	28,17				
13	Proporsi PTK penggerak	%				0	0				
14	Pengalaman pelatihan guru	%				46,8	46,8				
	SMP		2023					530,774,328,093			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Angka partisipasi kasar	%				103,39	103,39				
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	99,19				
3	Kemampuan literasi	%				70.64	73.11				
4	Kemampuan numerasi	Nilai				66.79	67.39				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				4.64	0				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				2.29	0				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				73.96	69.67				
8	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai				71.84	74.97				
9	Indeks iklim inklusivitas	%				62.71	56.71				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				16,57	16,57				
11	Indeks distribusi guru	%				0,35	0,35				
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				25,85	25,85				
13	Proporsi PTK penggerak	%				0	0				
3)	Pendidikan Kesetaraan		2023					52,297,375,000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	0				
2	Angka partisipasi sekolah	%				23,75	23,75				
3	Kemampuan literasi	%				55.71	53.45				
4	Kemampuan numerasi	Nilai				44.84	47.39				
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				12.94	0				
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				7.4	0				
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				61.8	62.84				
8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai				60.35	60.64				
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				54.22	54.03				
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				0	0				
11	Indeks distribusi guru	%				0	0				
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				0	0				
13	Proporsi PTK penggerak	%				0	0				

Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
				80.225.828.980			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					88.248.411.878			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67,21	67,21	67,21	67,21					67,26	67,26	67,26	67,26				
34,97	34,97	34,97	34,97					35,02	35,02	35,02	35,02				
55,46	55,46	55,46	55,46					55,51	55,51	55,51	55,51				
0,2	0,2	0,2	0,2					0,25	0,25	0,25	0,25				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,4	0,4	0,4	0,4					0,45	0,45	0,45	0,45				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
				649.241.313.270			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					714.165.444.597			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105,15	105,15	105,15	105,15					105,2	105,2	105,2	105,2				
99,77	99,77	99,77	99,77					99,82	99,82	99,82	99,82				
96,43	96,43	96,43	96,43					96,48	96,48	96,48	96,48				
65,93	65,93	65,93	65,93					65,98	65,98	65,98	65,98				
53,76	53,76	53,76	53,76					53,81	53,81	53,81	53,81				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
69,54	69,54	69,54	69,54					69,59	69,59	69,59	69,59				
72,43	72,43	72,43	72,43					72,48	72,48	72,48	72,48				
46,85	46,85	46,85	46,85					46,9	46,9	46,9	46,9				
0,45	0,45	0,45	0,45					0,5	0,5	0,5	0,5				
28,22	28,22	28,22	28,22					28,27	28,27	28,27	28,27				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
				288.208.265.950			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					317.029.092.545			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103,44	103,44	103,44	103,44					103,49	103,49	103,49	103,49				
99,24	99,24	99,24	99,24					99,29	99,29	99,29	99,29				
79,76	79,76	79,76	79,76					79,81	79,81	79,81	79,81				
73,16	73,16	73,16	73,16					73,21	73,21	73,21	73,21				
67,44	67,44	67,44	67,44					67,49	67,49	67,49	67,49				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				

69,72	69,72	69,72	69,72					69,77	69,77	69,77	69,77				
75,02	75,02	75,02	75,02					75,07	75,07	75,07	75,07				
16,62	16,62	16,62	16,62					16,67	16,67	16,67	16,67				
0,4	0,4	0,4	0,4					0,45	0,45	0,45	0,45				
25,9	25,9	25,9	25,9					25,95	25,95	25,95	25,95				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
				12.102.761.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					13.313.037.100			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23,8	23,8	23,8	23,8					23,85	23,85	23,85	23,85				
53,5	53,5	53,5	53,5					53,55	53,55	53,55	53,55				
47,44	47,44	47,44	47,44					47,49	47,49	47,49	47,49				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
62,89	62,89	62,89	62,89					62,94	62,94	62,94	62,94				
60,69	60,69	60,69	60,69					60,74	60,74	60,74	60,74				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				

Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
				97.073.253.066			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					106.780.578.372			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67,31	67,31	67,31	67,31					67,36	67,36	67,36	67,36				
35,07	35,07	35,07	35,07					35,12	35,12	35,12	35,12				
55,56	55,56	55,56	55,56					55,61	55,61	55,61	55,61				
0,3	0,3	0,3	0,3					0,35	0,35	0,35	0,35				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,5	0,5	0,5	0,5					0,55	0,55	0,55	0,55				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,25	0,25	0,25	0,25					0,3	0,3	0,3	0,3				
0,05	0,05	0,05	0,05					0,1	0,1	0,1	0,1				
				785.581.989.057			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					864.140.187.962			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105,25	105,25	105,25	105,25					105,3	105,3	105,3	105,3				
99,87	99,87	99,87	99,87					99,92	99,92	99,92	99,92				
96,53	96,53	96,53	96,53					96,58	96,58	96,58	96,58				
66,03	66,03	66,03	66,03					66,08	66,08	66,08	66,08				
53,86	53,86	53,86	53,86					53,91	53,91	53,91	53,91				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
69,64	69,64	69,64	69,64					69,69	69,69	69,69	69,69				
72,53	72,53	72,53	72,53					72,58	72,58	72,58	72,58				
46,95	46,95	46,95	46,95					47	47	47	47				
0,55	0,55	0,55	0,55					0,6	0,6	0,6	0,6				
28,32	28,32	28,32	28,32					28,37	28,37	28,37	28,37				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
				348.732.001.800			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					383.605.201.979			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103,54	103,54	103,54	103,54					103,59	103,59	103,59	103,59				
99,34	99,34	99,34	99,34					99,39	99,39	99,39	99,39				
79,86	79,86	79,86	79,86					79,91	79,91	79,91	79,91				
73,26	73,26	73,26	73,26					73,31	73,31	73,31	73,31				
67,54	67,54	67,54	67,54					67,59	67,59	67,59	67,59				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
69,82	69,82	69,82	69,82					69,87	69,87	69,87	69,87				
75,12	75,12	75,12	75,12					75,17	75,17	75,17	75,17				
16,72	16,72	16,72	16,72					16,77	16,77	16,77	16,77				

0,5	0,5	0,5	0,5					0,55	0,55	0,55	0,55				
26	26	26	26					26,05	26,05	26,05	26,05				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
				14.644.340.810			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					16.108.774.891			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23,9	23,9	23,9	23,9					23,95	23,95	23,95	23,95				
53,6	53,6	53,6	53,6					53,65	53,65	53,65	53,65				
47,54	47,54	47,54	47,54					47,59	47,59	47,59	47,59				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
62,99	62,99	62,99	62,99					63,04	63,04	63,04	63,04				
60,79	60,79	60,79	60,79					60,84	60,84	60,84	60,84				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				
0,15	0,15	0,15	0,15					0,2	0,2	0,2	0,2				

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Timur 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		2023	8536	5723			2.169.372.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)					8536	3799	0		droping	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah					8536	7481	0		droping	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan					8536	8228	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB					8536	5559	199.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah					8536	5559	0		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin					8536	7980	0		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV					8536	5679	0		droping	DINAS KESEHATAN
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu					8536	8228	0		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)					8536	8170	246.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					21	21	26.100.000		APBD	DINAS KESEHATAN
11	Gel USG					21	21	0		APBD	DINAS KESEHATAN
12	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi					160	74			APBD	DINAS KESEHATAN
13	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
14	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian					145	87				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)					8536	5723				DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2023	8536	7427			1.421.029.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf					8536	7427	0		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)					8536	7427	0		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)					8536	7427	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					21	21	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi					160	74				DINAS KESEHATAN

6	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
7	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kefarmasian					145	87				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2023	8514	7222			1.990.727.724		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)					7520	6015	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi					8514	7489	3.818.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik					8514	7489	72.676.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir					8514	7489	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)					8514	7489	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)					8514	7489	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					8514	7489	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/dokter spesialis Anak					161	74				DINAS KESEHATAN
9	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
10	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian					145	87				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku					64	24				DINAS KESEHATAN
13	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
14	Kader Kesehatan					141	141				DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita		2023	42764	41006			1.200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku					42764	41006	0		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)					42764	41006	0		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)					8587	7489	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru					7193	4888	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah					26514	14797	0		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG					7474	7144	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes					7474	5881	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV					7474	5675	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib					7474	5411	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella					7474	6594	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib					7313	4366	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella					7313	4754	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)					128222	98716	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
14	Peralatan Anafilaktik					21	21	0		APBD	DINAS

										KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk					42	42			DINAS KESEHATAN
16	Dokter					152	71			DINAS KESEHATAN
17	Bidan					824	600			DINAS KESEHATAN
18	Perawat					1013	658			DINAS KESEHATAN
19	Tenaga Gizi					84	40			DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD					6492	6492			DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan					141	141			DINAS KESEHATAN
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		2023	73019	68231			4.240.857.000	APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku					73019	68231	172.827.000	APBD	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan					17192	14296	9.924.450	APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan					73019	68231	15.586.620	APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah					73019	68231	0	APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah					17192	14296	0	APBD	DINAS KESEHATAN
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah					11196	8926	0	DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Alat Pemeriksaan Hb					42	42	161.694.750	DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7					5487	5361	99.587.450	APBD, DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Media promosi kesehatan					42	42	7.875.000	APBD	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)					28375	21360		APBD	DINAS KESEHATAN
11	Dokter/Dokter Gigi					208	92			DINAS KESEHATAN
12	Bidan					824	600			DINAS KESEHATAN
13	Perawat					1013	658			DINAS KESEHATAN
14	Tenaga Gizi					84	40			DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian					145	87			DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat					192	85			DINAS KESEHATAN
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru					417	125			DINAS KESEHATAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor					805	805			DINAS KESEHATAN
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		2023	322745	305852			849.610.000	APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)					42	42		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat Ukur Lengan Atas (LILA)					210	210		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat : Tensimeter					42	40		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat : Glukometer					42	40		APBD	DINAS KESEHATAN

5	Alat : Alat Pemeriksa Hb					42	40			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol					322745	305852	443.484.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat : KIT IVA Tes					42	40			APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb					322745	305852			APBD	DINAS KESEHATAN
9	Kit Ophthalmologi Komunitas					42	40			APBD	DINAS KESEHATAN
10	Kuesioner PUMA					322745	305852			APBD	DINAS KESEHATAN
11	Alat Pelayanan KB					291	252			APBD	DINAS KESEHATAN
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)					210	200			APBD	DINAS KESEHATAN
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)					93621	2890			APBD	DINAS KESEHATAN
14	Dokter					152	71				DINAS KESEHATAN
15	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
16	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat					192	85				DINAS KESEHATAN
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu					210	210				DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		2023	38899	24039			1.400.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter					21	21	100.100.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah					21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat pemeriksaan kolesterol					21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol					38899	24039	476.320.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)					38899	24039			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya					38899	4050	109.819.000		DAU TERARAH	DINAS KESEHATAN
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					21	21	39.185.500		DAU TERARAH	DINAS KESEHATAN
8	Dokter					152	71				DINAS KESEHATAN
9	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
10	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat					192	85				DINAS KESEHATAN
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu					729	729				DINAS KESEHATAN
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2023	124466	121140			300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)					210	210	9.960.000		APBD	DINAS KESEHATAN

2	Obat Hipertensi					124466	121140			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Tensimeter					42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)					210	205			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					210	205			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter					152	71				DINAS KESEHATAN
7	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
8	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku					64	24				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian					145	87				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat					192	85				DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		2023	10578	10482			1.277.611.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Obat Diabetes Melitus					10578	10482			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Fotometer atau Glukometer					42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet					10578	10482	323.812.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)					42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					210	210	14.871.500		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter					152	71				DINAS KESEHATAN
7	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
8	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Kefarmasian					145	87				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat					192	85				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi					84	40				DINAS KESEHATAN
12	Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)					116	75				DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		2023	470	432			200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)					210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Penyediaan Psikofarmaka					21	21	460.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi					210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan					210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan					210	210	0		APBD	DINAS

	Edukasi (KIE)										KESEHATAN
6	Dokter					152	71	0			DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa					42	38	0			DINAS KESEHATAN
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa					210	185	0			DINAS KESEHATAN
9	Tenaga profesional lainnya					21	18	0			DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2023	11399	8116			3.003.337.392		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					120	120	63.278.750		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Reagen Zn TB					471	104			DROPPING	DINAS KESEHATAN
3	Masker bedah dan Masker N95					2182	2182			DROPPING	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering					3982	3982			DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Katrid tes cepat molekuler					9774	5855	555.728.142		APBN	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan					60	60			DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)					147	147			DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Tuberkulin					86	86			DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru					167	78				DINAS KESEHATAN
10	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian					145	87				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat					192	85				DINAS KESEHATAN
13	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)					116	75				DINAS KESEHATAN
14	Radiografer					35	20				DINAS KESEHATAN
15	Kader Kesehatan					670	430				DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		2023	19288	19288			3.334.720.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)					19288	19288	270.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama					19288	19288	1.500.000.000		APBD dan Droning	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai					19288	19288	1.000.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK					19288	19288	200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin					167	79				DINAS KESEHATAN
6	Bidan					824	600				DINAS KESEHATAN
7	Perawat					1013	658				DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)					116	75				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat					192	85				DINAS KESEHATAN

10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan				72	72				DINAS KESEHATAN
----	---	--	--	--	----	----	--	--	--	-----------------

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota								
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8368	8368			2.000.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)			21679	21679	0		droping	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah			1506240	1506240	310.000.000		droping	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan			8368	8368	40.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB			8368	8368	300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah			8368	8368	30.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin			8368	8368	150.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV			8368	8368	0		droping	DINAS KESEHATAN
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu			8368	8368	60.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8368	8368	307.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	36.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
11	Gel USG			21	21	6.037.500		APBD	DINAS KESEHATAN
12	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)			7987	7987				DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7987	7987			1.800.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf			7987	7987	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)			7987	7987	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			7987	7987	522.504.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	76.464.000		APBD	DINAS KESEHATAN

5	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6829	6829			1.799.987.772,53		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)			8105	8105	14.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi			8105	8105	6.406.604		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik			8105	8105	96.114.010		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir			8105	8105	0		Dropping	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			8105	8105	0		Dropping	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8368	8368	60.352.365		APBD dan Dropping	DINAS KESEHATAN
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			8368	8368	0		Dropping	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/dokter spesialis Anak			25	25				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	41930	41930			800.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			41930	41930	8.400.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			41930	41930	27.639.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			8368	8368	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru			7479	7479	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah			28026	28026	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			225628	225628	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN

14	Peralatan Anafilaktik			21	21	12.038.000		APBD	DINAS KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk			66	66	591.892.320		APBD	DINAS KESEHATAN
16	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD			6492	6492				DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	77119	77119			2.300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku			77119	77119	191.697.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan			12921	12921	14.297.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan			77119	77119	38.566.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			77119	77119	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			12921	12921	0		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah			5487	5487	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Alat Pemeriksaan Hb			42	42	0		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7			7456	7456	77.202.000		DAK NF	DINAS KESEHATAN
9	Media promosi kesehatan			42	42	34.463.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)			20098	20098	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Dokter/Dokter Gigi			42	42				DINAS KESEHATAN
12	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru			404	404				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor			785	785				DINAS KESEHATAN
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	291003	291003			950.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			42	42	11.878.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat : Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat : Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat : Alat Pemeriksa Hb			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol			291003	291003	455.550.000		APBD	DINAS KESEHATAN

7	Alat : KIT IVA Tes			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb			291003	291003			APBD	DINAS KESEHATAN
9	Kit Ophthalmologi Komunitas			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
10	Kuesioner PUMA			291003	291003			APBD	DINAS KESEHATAN
11	Alat Pelayanan KB			291	291			APBD	DINAS KESEHATAN
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)			106010	106010	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
14	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			210	210				DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	41653	41653			2.200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat pemeriksaan kolesterol			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol			41653	41653	1.094.566.000		APBD&DT	DINAS KESEHATAN
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)			41653	41653	65.346.000		PAJAK ROKOK	DINAS KESEHATAN
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya			41653	41653	268.340.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			729	729				DINAS KESEHATAN
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	116025	116025			450.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			210	210	10.250.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Obat Hipertensi			116025	116025			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			180	180			APBD	DINAS KESEHATAN

6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9861	9861			950.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Obat Diabetes Melitus			9861	9861			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Fotometer atau Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet			9861	9861	186.096.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	23.778.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	483	483			550.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Penyediaan Psikofarmaka			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	30.948.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21	0			DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
9	Tenaga profesional lainnya			21	21	0			DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12647	12647			1.300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			120	120				DINAS KESEHATAN

2	Reagen Zn TB			471	471			DROPPING	DINAS KESEHATAN
3	Masker bedah dan Masker N95			2182	2182			DROPPING	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			1810	1810	150.000.000		DROPPING/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Katrid tes cepat molekuler			9844	9844			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			60	60			DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)			40	40			DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Tuberkulin			86	86			DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			36	36				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Radiografer			10	10				DINAS KESEHATAN
15	Kader Kesehatan			500	500				DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	20361	20361			2.150.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			70	70	150.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama			20361	20361	1.000.000.000		APBD dan Droning	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			20361	20361	900.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			20361	20361	100.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			36	36				DINAS KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan			80	80				DINAS KESEHATAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28
	Kabupaten/Kota								
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8561	8561			1.518.831.700		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)			21679	21679	0		droping	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah			1540980	1540980	310.000.000		droping	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan			8561	8561	40.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB			8561	8561	300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah			8561	8561	30.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin			8561	8561	150.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV			8561	8561	0		droping	DINAS KESEHATAN
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu			8561	8561	60.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8561	8561	307.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	36.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
11	Gel USG			21	21	6.037.500		APBD	DINAS KESEHATAN
12	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)			8186	8186				DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8186	8186			950.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf			8186	8186	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)			8186	8186	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8186	8186	522.504.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	76.464.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS

									KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7520	7520			2.408.362.236		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)			7520	7520	25.200.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi			7520	7520	4.410.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik			7520	7520	22.932.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir			7520	7520	60.000.000		APBD dan Dropping	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			7520	7520	60.000.000		APBD dan Dropping	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8561	8561	128.415.000		APBD dan Dropping	DINAS KESEHATAN
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			8561	8561	65.000.000		APBD dan Dropping	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/dokter spesialis Anak			25	25				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	35125	35125			2.200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			35125	35125	56.350.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			35125	35125	30.402.900		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			8561	8561	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru			7479	7479	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah			28026	28026	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			225628	225628	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN

14	Peralatan Anafilaktik			21	21	13.241.800		DROPPING	DINAS KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk			66	66			APBD	DINAS KESEHATAN
16	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD			6492	6492				DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	79434	79434			2.000.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku			79434	79434	199.364.880		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan			12921	12921	129.210.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan			79434	79434	238.302.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			79434	79434	756.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			12921	12921	0		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah			7456	7456	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Alat Pemeriksaan Hb			42	42	166.545.592		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7			7456	7456	178.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Media promosi kesehatan			42	42	34.463.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)			20098	20098	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Dokter/Dokter Gigi			42	42				DINAS KESEHATAN
12	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru			404	404				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor			785	785				DINAS KESEHATAN
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	355020	355020			1.204.008.100		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			42	42	12.150.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat : Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat : Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat : Alat Pemeriksa Hb			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol			355020	355020	470.550.000		APBD	DINAS KESEHATAN

7	Alat : KIT IVA Tes			42	42	40.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb			355020	355020			APBD	DINAS KESEHATAN
9	Kit Ophthalmologi Komunitas			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
10	Kuesioner PUMA			355020	355020			APBD	DINAS KESEHATAN
11	Alat Pelayanan KB			291	291			APBD	DINAS KESEHATAN
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)			106010	106010	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
14	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			210	210				DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	41653	41653	22108	22108	2.000.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat pemeriksaan kolesterol			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol			41653	41653	1.928.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)			41653	41653	83.306.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya			41653	41653	478.820.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	151.750.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			729	729				DINAS KESEHATAN
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	136913	136913			220.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			210	210	12.567.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Obat Hipertensi			136913	136913			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			180	180			APBD	DINAS KESEHATAN

6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11636	11636			1.700.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Obat Diabetes Melitus			11636	11636			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Fotometer atau Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet			11636	11636	192.410.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	24.310.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	562	562			809.809.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			210	210	100.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Penyediaan Psikofarmaka			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	32.450.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21	0			DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
9	Tenaga profesional lainnya			21	21	0			DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9844	9844			3.704.948.114		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			120	120	100.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN

2	Reagen Zn TB			471	471			DROPPING	DINAS KESEHATAN
3	Masker bedah dan Masker N95			2182	2182	250.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			1810	1810	350.000.000		DROPPING/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Katrid tes cepat molekuler			9774	9774	500.000.000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			60	60				DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)			40	40				DINAS KESEHATAN
8	Tuberkulin			86	86	200.000.000		APBD/DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			36	36	650.000.000			DINAS KESEHATAN
10	Perawat			40	40	500.000.000			DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			30	30	200.000.000			DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			30	30	360.000.000			DINAS KESEHATAN
14	Radiografer			10	10	50.000.000			DINAS KESEHATAN
15	Kader Kesehatan			300	300	1.800.000.000			DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	17800	17800			3.717.231.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			1000	1000	200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama			21000	21000	2.000.000.000		APBD dan Droning	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			21000	21000	1.000.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			21000	21000	517.231.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			36	36				DINAS KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan			90	90				DINAS KESEHATAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota								
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8766	8766			1.518.831.700		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)			21679	21679	0		droping	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah			1577880	1577880	310.000.000		droping	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan			8766	8766	40.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB			8766	8766	300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah			8766	8766	30.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin			8766	8766	150.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV			8766	8766	0		droping	DINAS KESEHATAN
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu			8766	8766	60.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8766	8766	307.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	36.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
11	Gel USG			21	21	6.037.500		APBD	DINAS KESEHATAN
12	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)			8392	8392				DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8392	8392			4.415.918.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf			8392	8392	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)			8392	8392	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8392	8392	522.504.000		APBD	DINAS KESEHATAN

4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	76.464.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7520	7520			5.537.112.300		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)			7520	7520	27.720.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi			7520	7520	4.851.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik			7520	7520	25.225.200		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir			7520	7520	66.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			7520	7520	66.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8766	8766	141.256.500		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			8766	8766	71.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/dokter spesialis Anak			25	25				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	35125	35125			3.101.367.100		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			35125	35125	61.985.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			35125	35125	33.443.190		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			8766	8766	399.420.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru			7479	7479	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah			28026	28026	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN

13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			225628	225628	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
14	Peralatan Anafilaktik			21	21	14.565.980		DROPPING	DINAS KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk			66	66			APBD	DINAS KESEHATAN
16	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD			6492	6492				DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	81817	81817			4.191.990.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku			81817	81817	199.364.880		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan			12921	12921	129.210.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan			81817	81817	52.188.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			81817	81817	831.600		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			12921	12921	0		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah			7456	7456	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Alat Pemeriksaan Hb			42	42	171.541.959		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7			7456	7456	195.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Media promosi kesehatan			42	42	37.909.300		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)			20098	20098	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Dokter/Dokter Gigi			42	42				DINAS KESEHATAN
12	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru			404	404				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor			785	785				DINAS KESEHATAN
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	390521	390521			2.543.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			42	42	12.225.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat : Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat : Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat : Alat Pemeriksa Hb			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN

6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol			390521	390521	485.100.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat : KIT IVA Tes			42	42	45.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb			390521	390521			APBD	DINAS KESEHATAN
9	Kit Ophthalmologi Komunitas			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
10	Kuesioner PUMA			390521	390521			APBD	DINAS KESEHATAN
11	Alat Pelayanan KB			291	291			APBD	DINAS KESEHATAN
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)			106010	106010	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
14	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			210	210				DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	41653	41653	22108		3.028.719.400		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat pemeriksaan kolesterol			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol			41653	41653	1.928.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)			41653	41653	83.306.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya			41653	41653	478.820.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	151.750.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			729	729				DINAS KESEHATAN
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	150604	150604			1.670.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			210	210	14.532.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Obat Hipertensi			150604	150604			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN

5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			180	180			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12799	12799			5.748.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Obat Diabetes Melitus			12799	12799			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Fotometer atau Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet			12799	12799	196.204.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	27.540.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	562	562			1.575.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			21	21	125.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Penyediaan Psikofarmaka			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	33.810.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21	0			DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
9	Tenaga profesional lainnya			21	21	0			DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9844	9844			4.555.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN

1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			120	120	50.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Reagen Zn TB			471	471			DROPPING	DINAS KESEHATAN
3	Masker bedah dan Masker N95			2182	2182			DROPPING	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			1810	1810	200.000.000		APBD/DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Katrid tes cepat molekuler			9774	9774	500.000.000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			60	60				DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)			40	40				DINAS KESEHATAN
8	Tuberkulin			86	86	300.000.000		APBD/DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			36	36	650.000.000			DINAS KESEHATAN
10	Perawat			40	40	500.000.000			DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			30	30	200.000.000			DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			30	30	360.000.000			DINAS KESEHATAN
14	Radiografer			10	10	100.000.000			DINAS KESEHATAN
15	Kader Kesehatan			300	300	1.800.000.000			DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	17800	17800			4.147.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			2000	2000	247.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama			22000	22000	2.000.000.000		APBD dan Droping	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			22000	22000	1.500.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			22000	22000	400.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			36	36				DINAS KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan			100	100				DINAS KESEHATAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	37	38	39	40	41	42	35	36
	Kabupaten/Kota								
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8876	8876			1.518.831.700		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)			21679	21679	0		droping	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah			1597680	1597680	310.000.000		droping	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan			8876	8876	40.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB			8876	8876	300.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah			8876	8876	30.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin			8876	8876	150.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV			8876	8876	0		droping	DINAS KESEHATAN
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu			8876	8876	60.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8876	8876	307.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	36.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
11	Gel USG			21	21	6.037.500		APBD	DINAS KESEHATAN
12	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)			8602	8602				DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8602	8602			4.415.918.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf			8602	8602	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)			8602	8602	50.976.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8602	8602	522.504.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	76.464.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi			29	29				DINAS

									KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7520	7520			5.537.112.300		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)			7520	7520	30.492.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi			7520	7520	5.336.100		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik			7520	7520	27.747.720		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir			7520	7520	72.600.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			7520	7520	72.600.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			8876	8876	155.382.150		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			8876	8876	78.650.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/dokter spesialis Anak			25	25				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	35125	35125			3.101.367.100		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			35125	35125	68.183.500		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			35125	35125	36.787.509		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			8876	8876	443.800.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru			7479	7479	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah			28026	28026	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella			8105	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella			8144	8105	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			225628	225628	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN

14	Peralatan Anafilaktik			21	21	16.022.578		DROPPING	DINAS KESEHATAN
15	Formula Terapi Gizi Buruk			66	66			APBD	DINAS KESEHATAN
16	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
20	Guru PAUD			6492	6492				DINAS KESEHATAN
21	Kader Kesehatan			141	141				DINAS KESEHATAN
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	84272	84272			4.191.990.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku			84272	84272	199.364.880		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan			12921	12921	129.210.000		APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan			84272	84272	53.753.640		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			84272	84272	856.548		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			12921	12921	0		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah			7456	7456	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
7	Alat Pemeriksaan Hb			42	42	176.688.217		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7			7456	7456	215.380.000		APBD	DINAS KESEHATAN
9	Media promosi kesehatan			42	42	41.700.230		APBD	DINAS KESEHATAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)			20098	20098	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
11	Dokter/Dokter Gigi			42	42				DINAS KESEHATAN
12	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
14	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru			404	404				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor			785	785				DINAS KESEHATAN
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	429574	429574			2.543.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			42	42	12.540.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat : Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat : Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Alat : Alat Pemeriksa Hb			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol			429574	429574	505.220.000		APBD	DINAS KESEHATAN

7	Alat : KIT IVA Tes			42	42	50.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb			429574	429574			APBD	DINAS KESEHATAN
9	Kit Ophthalmologi Komunitas			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
10	Kuesioner PUMA			429574	429574			APBD	DINAS KESEHATAN
11	Alat Pelayanan KB			291	291			APBD	DINAS KESEHATAN
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)			106010	106010	0		DROPPING	DINAS KESEHATAN
14	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
15	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
16	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
17	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
18	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			210	210				DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	41653	41653	22108		3.028.719.400		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat pemeriksaan kolesterol			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol			41653	41653	1.928.500.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)			41653	41653	83.306.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya			41653	41653	478.820.000		APBD	DINAS KESEHATAN
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			21	21	151.750.000		APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu			729	729				DINAS KESEHATAN
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	165664	165664			1.670.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			210	210	15.250.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Obat Hipertensi			165664	165664			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Tensimeter			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)			210	210			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			180	180			APBD	DINAS KESEHATAN

6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14079	14079			5.748.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Obat Diabetes Melitus			14079	14079			APBD	DINAS KESEHATAN
2	Fotometer atau Glukometer			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet			14079	14079	210.595.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)			42	42			APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	27.557.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Kefarmasian			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Gizi			21	21				DINAS KESEHATAN
12	Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	562	562			1.575.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			210	210	125.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Penyediaan Psikofarmaka			21	21			APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan			210	210	0		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			210	210	35.550.000		APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter			21	21	0			DINAS KESEHATAN
7	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa			21	21	0			DINAS KESEHATAN
9	Tenaga profesional lainnya			21	21	0			DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9774	9774			4.555.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			120	120	200.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN

2	Reagen Zn TB			471	471			DROPPING	DINAS KESEHATAN
3	Masker bedah dan Masker N95			2182	2182	350.000.000		DROPPING	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering			1810	1810			APBD/DROPPING	DINAS KESEHATAN
5	Katrid tes cepat molekuler			9774	9774	700.000.000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			60	60				DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)			40	40				DINAS KESEHATAN
8	Tuberkulin			86	86	300.000.000		APBD/DROPPING	DINAS KESEHATAN
9	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			36	36	650.000.000			DINAS KESEHATAN
10	Perawat			40	40	500.000.000			DINAS KESEHATAN
11	Tenaga Kefarmasian			30	30	200.000.000			DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
13	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			30	30	360.000.000			DINAS KESEHATAN
14	Radiografer			10	10	100.000.000			DINAS KESEHATAN
15	Kader Kesehatan			300	300	2.000.000.000			DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	17800	17800			4.147.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			70	70	247.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama			23000	23000	2.000.000.000		APBD dan Droning	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			23000	23000	1.500.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			23000	23000	400.000.000		APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			36	36				DINAS KESEHATAN
6	Bidan			21	21				DINAS KESEHATAN
7	Perawat			21	21				DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			21	21				DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat			21	21				DINAS KESEHATAN
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan			120	120				DINAS KESEHATAN

Tabel 3.3

Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		2023	29670	12920			160,209,522,463			
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga				5934	2584			APBD	DPUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga				5934	2584			APBD	DPUPR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga				30	30			APBD	DPUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga				30	30			APBD	DPUPR
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		2023	1025	1025			1,500,000,000			
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				205	205			APBD	DPUPR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga				1	1			APBD	DPUPR
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga				205	205			APBD	DPUPR

Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
64.384	53.537	80,00%	60.46%	40.000.000.000		APBD	DPUPR	66.402	56.886	80,00%	63,74%	40.000.000.000		APBD	DPUPR
64.384	53.537	80,00%	60.46%	-		APBD	DPUPR	66.402	56.886	80,00%	63,74%	-		APBD	DPUPR
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-		APBD	DPUPR
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-		APBD	DPUPR
-	-	-	-	1.200.000.000		APBD	DPUPR	-	-	-	-	1.300.000.000		APBD	DPUPR
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-		APBD	DPUPR
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-		APBD	DPUPR
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-		APBD	DPUPR
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-		APBD	DPUPR

Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)				
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
68.730	60.499	80,00%	66,91%	40.000.000.000		APBD	DPUPR	73.515	64.198	80,00%	69,98%	40.000.000.000
68.730	60.499	80,00%	66,91%	-		APBD	DPUPR	73.515	64.198	80,00%	69,98%	-
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.300.000.000		APBD	DPUPR	-	-	-	-	1.300.000.000
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		APBD	DPUPR	-	-	-	-	-

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kutai Timur 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	2023	175	175			7,828,514.000			
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				35	35	5,513,514,000	On proses	APBD	PERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah								APBD	PERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah						2,315,000,000			
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	2023	100	100	100 Orang	100 Orang	20,112,362,500			
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				20	20			APBD	PERKIM
2	Subsidi uang sewa	Rumah				20	20			APBD	PERKIM
3	Penyediaan rumah layak huni	Rumah							On proses	APBD	PERKIM

Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
100 Unit	100 Unit	500 Orang	500 Orang	6.000.000.000		APBD	PERKIM	100 Unit	100 Unit	500 Orang	500 Orang	6.000.000.000		APBD	PERKIM
34 Unit	34 Unit	170 Orang	170 Orang	4.000.000.000		APBD	PERKIM	50 Unit	50 Unit	250 Orang	250 Orang	28.750.000.000		APBD	PERKIM
30 Unit	31 Unit	150 Orang	150 Orang	13.500.000.000		APBD	PERKIM	50 Unit	50 Unit	250 Orang	250 Orang	28.750.000.000		APBD	PERKIM

Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
100 Unit	100 Unit	500 Orang	500 Orang	6.000.000.000		APBD	PERKIM	100 Unit	100 Unit	500 Orang	500 Orang	6.000.000.000		APBD	PERKIM
50 Unit	50 Unit	250 Orang	250 Orang	28.750.000.000		APBD	PERKIM	50 Unit	50 Unit	250 Orang	250 Orang	28.750.000.000		APBD	PERKIM
50 Unit	50 Unit	250 Orang	250 Orang	28.750.000.000		APBD	PERKIM	50 Unit	50 Unit	250 Orang	250 Orang	28.750.000.000		APBD	PERKIM

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Orang	2023	29	29						
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (<i>jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional</i>)	Unit				430	428	13,877,648,875		APBD	Satuan Polsii Pamong Praja
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (<i>SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli</i>)	Dokumen				7	7			APBD	Satuan Polsii Pamong Praja
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (<i>jumlah dan kualitas personil/SDM</i>)	Orang				308	267			APBD	Satuan Polsii Pamong Praja
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (<i>pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan</i>)	Dokumen				1	1			APBD	Satuan Polsii Pamong Praja
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (<i>kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat</i>)	Orang								APBD	Satuan Polsii Pamong Praja
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (<i>pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat</i>)	Orang								APBD	Satuan Polsii Pamong Praja
2)	Kebencanaan	Orang	2023	144	144			43,582,090,331			
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana										

	(KEBENCANAAN)										
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (<i>tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal</i>)	Dokumen				2	2			PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang				144	144				
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (<i>tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia</i>)					445	445			PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana					10	10			0	
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2023			60	60	36,131,764,300			
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (<i>seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll</i>)	Unit				68	68				
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (<i>terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>)	Orang				30	30			PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2023			210	210	727,671,000			
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (<i>terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana</i>)	Posko				6	6			PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang				99	99			0	0
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (<i>penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana</i>)	Dokumen				1	1			PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (<i>terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam</i>)	Layanan				0	0			0	0
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan				3	3			PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Orang	2023	2400	2200			20,131,950,000			
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (<i>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam</i>)	Layanan				37	37			APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur

	kebakaran/redkar)										
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (<i>seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.</i>)	Dokumen				34	34			APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (<i>pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.</i>), penyelamatan dan evakuasi (<i>helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.</i>)	Unit				451	451			APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (<i>jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I</i>)	Orang				62	62			APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (<i>korban jiwa langsung</i>)	Layanan				2	2			APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (<i>korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran</i>)	Layanan				2	2			APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur

[illegible]

0	0	0	0	200.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	200.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0	0	0	0	0	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	0	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0	0	0	0	0	0	0	0								
100%	0	100%	0	50.000.000		PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	1.500.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0	0	0	0	0	0	0	0								
100%	0	100%	0	50.000.000		PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	1.450.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	17	80%	100%	13.878.305.665		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	17	17	80%	100%	13.878.305.665		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
34	34	80%	100%	922.080.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	34	34	80%	100%	922.080.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
46	46	80%	100%	8.976.603.676		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	46	46	80%	100%	8.976.603.676		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
41	41	80%	100%	93.991.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	41	41	80%	100%	93.991.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
2	2	80%	100%	96.170.258		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	2	2	80%	100%	96.170.258		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
2	2	80%	100%	94.299.180		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	2	2	80%	100%	94.299.180		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur

100%	0	0	0	200.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	200.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100%	0	0	0	250.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	250.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100%	0	0	0	1.500.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	1.500.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
100%	0	0	0	1.450.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	0	0	0	1.450.000.000	0	PAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	17	80%	100%	13.878.305.665		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	17	17	80%	100%	13.878.305.665		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
34	34	80%	100%	922.080.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	34	34	80%	100%	922.080.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
46	46	80%	100%	8.976.603.676		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	46	46	80%	100%	8.976.603.676		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
41	41	80%	100%	93.991.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	41	41	80%	100%	93.991.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
2	2	80%	100%	96.170.258		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	2	2	80%	100%	96.170.258		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur
2	2	80%	100%	94.299.180		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur	2	2	80%	100%	94.299.180		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Timur

Tabel 3.7 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Kutai Timur 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	167	50	50			4,479,899,004			
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	11			50	50			APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanaan	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu	Orang	25			37	37			APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	5			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	25			32	32			APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	11			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan	Orang	10			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	200	53	53					APBD	DINAS SOSIAL

1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	13			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan	Orang	25			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang	Orang	25			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	25			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	25			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	25			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				53	53			APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	30			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10			53	53			APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25			18	18			APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan	Orang	5			15	15			APBD	DINAS SOSIAL
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	153	65	65					APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	12			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan	Orang	25			59	59			APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang	Orang	25			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan alat bantu	Orang				6	6			APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				6	6			APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	25			59	59			APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	25			59	59			APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	25			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	0			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10			6	6			APBD	DINAS SOSIAL

12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
13	Layanan rujukan	Orang	5			4	4			APBD	DINAS SOSIAL
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	150	49	49					APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	25			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	13			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan permakanan	Orang	26			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang	Orang	26			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				6	6			APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	26			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	26			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	0			6	6			APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	10			49	49			APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10			36	36			APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan	Orang	0			20	20			APBD	DINAS SOSIAL
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	553	3286	3286			2,329,899,004		APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan	Orang	553			3286	3286			APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang	Orang	553			609	609			APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	20			20	20			APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	100			100	100			APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	100			100	100			APBD	DINAS SOSIAL

Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
162	162			1.500.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	100	100			1.600.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	50.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
						APBD	DINAS SOSIAL							APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	100	100	100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

		70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	35.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	35.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
42	42					APBD	DINAS SOSIAL	25	25					APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	35.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	35.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
26	25					APBD	DINAS SOSIAL							APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	50	50	100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25			APBD	DINAS SOSIAL			25	25			APBD	DINAS SOSIAL

				40.000.000								40.000.000			
		25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		90	90	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	35.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	55.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
						APBD	DINAS SOSIAL							APBD	DINAS SOSIAL
3000	3000					APBD	DINAS SOSIAL	4000	4000					APBD	DINAS SOSIAL
		3000	3000	350.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			4000	4000	1.800.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		3000	3000	100.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			4000	4000	500.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		20	20	200.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			4000	4000	200.000.000,0		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	50.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100			APBD	DINAS SOSIAL			100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
110	110			1.600.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	110	110			1.600.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			110	110	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	45.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
						APBD	DINAS SOSIAL							APBD	DINAS SOSIAL
80	80	100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	100	100	100	100	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	25.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

[illegible]

				45.000.000								45.000.000			
		80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			80	80	30.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			70	70	20.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	40.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			25	25	10.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			30	30	15.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		40	40	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			40	40	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	70.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		50	50	55.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			50	50	55.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
						APBD	DINAS SOSIAL							APBD	DINAS SOSIAL
4000	4000					APBD	DINAS SOSIAL							APBD	DINAS SOSIAL
		4000	4000	1.800.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	4000	4000	4000	4000	1.800.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		4000	4000	500.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			4000	4000	500.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		4000	4000	200.000.000,0		APBD	DINAS SOSIAL			4000	4000	200.000.000,0		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
		100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL			100	100	60.000.000		APBD	DINAS SOSIAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM sehingga menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam

menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program serta kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM kedalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap semester.

Dalam hal ini, kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik, akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini, pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar serta prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan serta pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Kutai Timur, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa yang menyebabkan tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

- b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan,

sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
6. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi serta berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 2. Bagaimana SPM diposisikan?
 3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Kutai Timur masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM kedalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat tentang program, kegiatan dan sub kegiatan,

penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Kutai Timur berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Kutai Timur secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Kutai Timur.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP. 19850112 201101 1 003

